

Konsistensi penerapan ketentuan persamaan pada pokoknya dalam undang-undang merek no 15 tahun 2001 pada putusan pengadilan; kasus extra joss dan ikea = Consistency of likelihood of confusion clause according to Indonesia's mark law no 15 year 2001: Extra Joss and IKEA cases

Nani Nuraeni, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20367885&lokasi=lokal>

Abstrak

Skripsi ini membahas tentang ketentuan persamaan pada pokoknya dalam sebuah merek berdasarkan pada doktrin-doktrin merek yang dianut dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Doktrin-doktrin merek tersebut menjadi dasar pengujian dalam penolakan pendaftaran merek, oposisi, pembatalan, dan juga salah satu dasar gugatan dalam sebuah pelanggaran merek. Sebagai pembanding tentang ketentuan tersebut digunakan ketentuan yang dianut sistem Amerika Serikat dan Masyarakat Uni Eropa (European Economic Community). Untuk memahami konsistensi penerapan ketentuan tersebut dalam kasus digunakan dua buah kasus yaitu kasus sengketa merek antara Extra Joss melawan Enerjos dan Kasus IKEA dengan IKEMA. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif dengan desain preskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat inkonsistensi dalam penerapannya doktrindoktrin merek, sehingga diperlukan beberapa revisi terhadap undang-undang yang berlaku saat ini.

<hr>

This thesis investigated the use of likelihood of confusion clause from its doctrine point of view as stated in Indonesia's Mark Law No. 15 Year 2001. The doctrines serve as grounds for refusing registration, opposing application, canceling registration, and for claiming infringement of mark. The U.S System and European Economic Community (EEC) systems are used as comparison to the Indonesian law. To understand the application of the doctrines in cases, two cases were selected, which are Extra Joss versus Enerjos and IKEA versus IKEMA. This thesis used doctrinal method as a research method with prescriptif design.

The study found that there are inconsistencies in the application of the mark doctrines therefore some revisions to the law should be made accordingly.